

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Adanya tuntutan masyarakat akan terwujudnya *good governance* dalam pengelolaan organisasi publik, menjadikan akuntabilitas kinerja menjadi bagian yang sangat penting dalam memberikan pertanggungjawaban atas perencanaan atau pelaksanaan anggaran yang menjadi hak publik. Akuntabilitas kinerja berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 adalah:

“perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.”

Penting bagi pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah perlu membangun akuntabilitas melalui pelaporan kinerja yang relevan dan transparan. Pelaporan kinerja dituangkan dalam bentuk laporan kinerja instansi pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai visi, misi, dan tujuannya. Laporan kinerja instansi pemerintah juga bertujuan untuk memotivasi dan mengawasi pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Agar tercapai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, salah satunya adalah anggaran berbasis kinerja. Menurut Bastian (2006), “anggaran berbasis kinerja adalah sistem penganggaran berbasis hasil yang berkaitan erat dengan visi, misi, dan perencanaan

strategis organisasi.” Dengan adanya anggaran berbasis kinerja yang baik, penyusunan dan pengalokasian anggaran dapat lebih sesuai dengan skala prioritas atau kebutuhan yang diperlukan daerah tersebut sehingga diharapkan akuntabilitas kinerja dapat meningkat.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi tercapainya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik adalah sistem pelaporan. Menurut Abdullah (2005), “sistem pelaporan merupakan laporan yang menggambarkan sistem pertanggungjawaban bawahan kepada atasan.” Dengan adanya sistem pelaporan yang baik akan dapat meningkatkan kualitas laporan sehingga dapat memperbaiki perencanaan dan meningkatkan kinerja.

Selain itu, instansi pemerintah perlu menerapkan pengendalian akuntansi yang baik. Menurut Supriyono (2018), “pengendalian akuntansi adalah pengendalian yang mencakup rencana organisasi, semua metode dan prosedur terutama yang berkaitan dan berhubungan langsung dengan pengamanan aset dan keandalan catatan keuangan.” Dengan adanya pengendalian akuntansi yang baik diharapkan visi, misi, dan tujuan instansi pemerintah tercapai dan akuntabilitas kinerja instansi meningkat.

Dalam menjalankan sistem pelaporan dan pengendalian akuntansi perlu adanya kompetensi aparatur pemerintah yang memadai. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2011, “kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.” Aparatur pemerintah merupakan penunjang utama

instansi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan. Adanya aparatur pemerintah yang berkompeten akan membantu instansi pemerintah untuk dapat mencapai kinerja yang baik sehingga tujuan dapat tercapai.

Penelitian mengenai pengaruh anggaran berbasis kinerja, sistem pelaporan, pengendalian akuntansi, dan kompetensi aparatur pemerintah telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Berdasarkan penelitian Safitri (2020) menyimpulkan bahwa pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Kebumen, sedangkan sistem pelaporan dan kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Kebumen. Selain itu, berdasarkan penelitian oleh Agustin (2018) menyimpulkan bahwa pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Yogyakarta. Kemudian, berdasarkan penelitian oleh Putri (2018) menyimpulkan bahwa anggaran berbasis kinerja dan sistem pelaporan kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Selain itu, berdasarkan penelitian oleh Silalahi (2017) menyimpulkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. Kemudian, berdasarkan penelitian oleh Samosir (2020) menyimpulkan bahwa sistem pelaporan dan anggaran daerah berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali variabel independen berupa anggaran berbasis kinerja, sistem pelaporan, pengendalian akuntansi, dan kompetensi aparatur pemerintah yang telah diuji sebelumnya. Pada penelitian terdahulu belum ada yang menggabungkan empat variabel tersebut. Oleh karena itu, motivasi penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali variabel-variabel dari penelitian terdahulu terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tetapi dilakukan pada subjek yang berbeda.

Kemudian, peneliti memilih Kabupaten Purbalingga sebagai subjek penelitian karena diketahui berdasarkan LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Kabupaten Purbalingga tahun 2019, hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga memperoleh predikat B dengan nilai 61,50. Kabupaten Purbalingga meraih nilai terkecil dibandingkan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah se-eks karesidenan lainnya, di mana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperoleh predikat A, Pemerintah Kabupaten Cilacap dan Banyumas memperoleh predikat BB dan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara memperoleh predikat B dengan nilai 66,65 (<https://www.purbalinggakab.go.id/>). Berdasarkan hasil evaluasi, Kabupaten Purbalingga masih memperoleh predikat B dikarenakan:

1. Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu meningkatkan kualitas pelaporan kinerja di tingkat Pemerintah Daerah maupun di tingkat OPD guna perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.
2. Pegawai belum seluruhnya memahami indikator kinerja yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

3. Evaluasi internal OPD belum dilakukan secara berkala, sehingga hambatan atas pelaksanaan kinerja tidak terpantau dengan baik.
4. Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu menerapkan manajemen kinerja secara terintegrasi sehingga penerapan *performance based budgeting* dapat dioptimalkan secara konsisten di tingkat OPD.
5. Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu meningkatkan kualitas dan cakupan evaluasi program dengan mereviu program, kegiatan, dan komponen anggaran seluruh OPD untuk memastikan alokasi anggaran dapat fokus pada sasaran pencapaian.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, penelitian ini diberi judul **“Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Pelaporan, Pengendalian Akuntansi, dan Kompetensi Aparatur Pemerintah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga.”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Apakah anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Purbalingga?
2. Apakah sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Purbalingga?
3. Apakah pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Purbalingga?
4. Apakah kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Purbalingga?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali penelitian-penelitian terdahulu namun dengan subjek yang berbeda yaitu instansi pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga yang mendapatkan predikat B atas akuntabilitas kinerjanya pada tahun 2019 dan memerlukan beberapa perbaikan untuk mencapai akuntabilitas kinerja yang lebih baik.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teori, diharapkan penelitian ini dapat menambah ilmu dan pengetahuan mengenai pentingnya anggaran berbasis kinerja, sistem pelaporan, pengendalian akuntansi, dan kompetensi aparatur pemerintah pada instansi pemerintah daerah serta dapat menjadi referensi dan bahan pengembangan bagi penelitian sejenis.
2. Manfaat praktik, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan pertimbangan pemerintah daerah dalam memperbaiki dan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.